

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

NO	URAIAN INFORMASI	URAIAN HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa	Permendikbud No 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Selama Proses Pengadaan Barang Dan Jasa	1. Menimbulkan Persaingan Tidak Sehat Antar Penyedia 2. Menimbulkan Penilaian Yang Tidak Obyektif	1. Menjaga Keakuratan Dan Obyektifitas Penilaian 2. Penetapan Nilai Pengadaan Yang Akurat
2	Kode akses aplikasi elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Selama berlaku	Penyalahgunaan penilaian yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
3	SPJ,SPM, SPP, SP2D	UU No. 8/1974 tentang Keuangan Negara UU No. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Masa berlaku pekerjaan	Mengungkapkan data keuangan	Menjaga kerahasiaan data keuangan dan pembelanjaan
4	Rincian kegiatan anggaran Sekolah (RKAS)	Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022: Berisi Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan dana BOS secara detail untuk semua jenjang pendidikan Permendiknas No. 19 Tahun 2007: Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di setiap jenjang pendidikan Kepmendikbudristek 27/PP/2022: Menetapkan satuan biaya dana BOS Reguler dan BOS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Selama 1 Tahun Anggaran	Menimbulkan penilaian tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat

5	Penetapan kinerja pegawai	<u>UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN</u>: Menjadi landasan utama yang menegaskan bahwa setiap ASN wajib memiliki target kinerja terukur, selaras dengan tujuan organisasi, dan dievaluasi secara berkala (Pasal 41). <u>PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS</u>: Menjadi dasar pelaksanaan teknis dari ketentuan undang-undang sebelumnya (Pasal 78 UU No. 5 Tahun 2014). <u>PermenPAN-RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN</u>: Merinci lebih lanjut mengenai pengelolaan kinerja, termasuk predikat kinerja pegawai dan capaian kinerja organisasi. <u>SE MenPAN-RB No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai ASN</u>: Memberikan panduan teknis, termasuk tata cara penetapan predikat kinerja, baik secara tahunan maupun periodik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Selama Periode	Mengungkap data pribadi	Selama Periode
6	Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)/ Data Nominatif	Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (sebagai payung hukum kepegawaian terkini).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Selama Undang - Undang berlaku	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi

7	Nota Dinas: tentang pelaksanaan program/ informasi yang berkaitan dengan kegiatan intern SMA Negeri 9 Bandar Lampung	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan ini mencabut Permendagri Nomor 54 Tahun 2009.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan
8	Dokumen dan korespondensi terkait hukuman disiplin pegawai	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: Ini adalah landasan utama yang mengatur kewajiban, larangan, jenis hukuman disiplin, dan tata cara penjatuhan hukuman disiplin PNS. Peraturan ini juga mengamanatkan proses administrasi dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: Peraturan ini merinci lebih lanjut tata cara dan administrasi pelaksanaan hukuman disiplin, termasuk aspek pendokumentasian dan korespondensi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Tidak Terbatas	Akan mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data diri pegawai

9	Dokumen hasil penilaian kompetensi ASN lingkup	Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 8 yang menyebutkan kompetensi guru meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Perdirjen GTK) Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru, yang menyediakan panduan dan standar terperinci mengenai kompetensi yang diharapkan dari seorang guru. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7327 Tahun 2023 tentang Model Kompetensi Kepala Sekolah, yang mengatur standar kompetensi khusus untuk kepala sekolah.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan
---	--	---	--	----------------	---	---

Bandar Lampung, 16 Desember 2024

Kepala SMAN 9 Bandar Lampung



LINDA KRISNAWATI, M.Pd.
NIP 19701017 199903 2 002